



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAT
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 716376

II. DATA HARTA

- A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **408.800.000**
1. Tanah Seluas 593 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 200.000.000
 2. Tanah Seluas 761 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 54.000.000
 3. Tanah Seluas 471 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 34.600.000
 4. Tanah Seluas 343 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
 5. Tanah Seluas 1.451 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 77.600.000
 6. Tanah Seluas 329 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 17.600.000
- B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **33.000.000**
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
 2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
- C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp.** **13.500.000**
- D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **---**
- E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **402.471.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 857.771.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 857.771.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.